

ABSTRAK

Latar belakang tesis ini dikarenakan MPR yang merupakan salah satu lembaga negara yang menghasilkan produk hukum berupa TAP MPR, akan tetapi sampai dengan saat ini masih terjadi kekosongan hukum karena belum jelasnya mekanisme pengujian TAP MPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengujiannya. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui materi muatan Ketetapan MPR dan pengujian TAP MPR sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan materi muatan TAP MPR mengalami beberapa perubahan yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dari Orde lama, Orde baru dan Orde reformasi. Sampai dengan saat ini belum jelas mekanisme pengujian TAP MPR dan lembaga yang berwenang melakukannya, walaupun TAP MPR ini sudah beberapa kali diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Menurut pandangan Penulis bahwa TAP MPR hanya dapat dilakukan pengujian oleh lembaga MPR sendiri dengan berdasarkan asas *a contrarius actus*.

Kata Kunci : Materi Muatan, Pengujian, Ketetapan MPR.

ABSTRACT

The background of this thesis is because the MPR is one of the state institutions that produces legal products in the form of the MPR TAP, but until now there is still a legal vacuum due to the unclear mechanism for testing the MPR TAP and the institutions authorized to carry out the testing. This thesis research aims to determine the content of the MPR Decree and the examination of the MPR TAP in accordance with the constitutional system in Indonesia. The type of research used in the preparation of this thesis is descriptive qualitative with a normative juridical approach. The results showed that the content of the MPR TAP underwent several changes which were influenced by the government system of the Old Order, New Order and Reform Order. Until now, the mechanism for testing the TAP MPR and the institution authorized to do so is not clear, although this TAP MPR has been submitted for review to the Constitutional Court several times. In the author's view, the MPR TAP can only be tested by the MPR institution itself based on the principle of a contrarius actus..

Keywords: Content, Testing, MPR Decree.